

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan mempunyai dua fungsi:

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019
2. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan mencakup disusun tiap tahun ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan program-program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sudah disusun mampu memenuhi target dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang hendak dicapai. Selain itu juga sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan oleh pejabat berwenang untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini di susun semoga bisa menjadi laporan yang bermanfaat untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Magetan pada umumnya.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab I. Pendahuluan.....	3
A Latar Belakang.....	3
B Maksud dan Tujuan.....	4
C Gambaran Umum SKPD.....	4
1. Struktur Organisasi.....	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.....	8
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Visi.....	10
C. Misi.....	10
D. Tujuan.....	11
E. Sasaran.....	11
F. Matrik Hubungan Misi, Tujuan , Sasaran dan IKU.....	14
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.....	20
A. Capaian Kinerja.....	22
B. Analisis Capaian Kinerja.....	23
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	23
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019	
- Pencapaian Kinerja .....	26
- Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Rentra.....	29
- Pencairan Kinerja dan Anggaran.....	31
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
C Realisasi Anggaran.....	38
Bab IV. Penutup.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran dan Langkah-Langkah Mendatang .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk mewujudkan dan meningkatkan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magetan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kualitas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian serta Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dalam setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi program/kegiatan diperlukan penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan diperlukan langkah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik diperlukan penerapan kaidah kaidah dalam pengelolaan keuangan yang baik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas dan keterbukaan, sehingga pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian perlu kita sadari juga bahwa reformasi keuangan daerah yang terjadi selama ini belum diimbangi atau didukung oleh perencanaan kebutuhan kapasitas SDM yang memadai, sehingga implikasinya tidak hanya rendahnya kinerja laporan keuangan daerah tetapi juga adanya permasalahan hukum yang sering mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah, akibat adanya mispersepsi atau kapasitas SDM yang tidak memadai. Dan tentunya juga disebabkan karena adanya perubahan aturan keuangan daerah yang sangat fundamental yang belum diimbangi dengan tersedianya kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang memadai. Sebagai contoh penggunaan pendekatan anggaran kinerja dan penggunaan prinsip akuntansi akrual basis juga memerlukan pendekatan yang cukup rumit yang menuntut kapasitas SDM dengan kualifikasi yang khusus.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah, harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan perlu mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi baik program/kegiatan pada intern SKPD maupun antar SKPD serta program/kegiatan pada tingkatan pemerintahan. Yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) khususnya Aparatur yang bertugas mengelola pendapatan keuangan dan aset daerah yang kapasitasnya memadai dimana terhadap SDM yang ada saat ini masih perlu terus ditingkatkan pengetahuannya dan kemampuannya, agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Guna mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan tugas umum pemerintahan sehingga dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah :

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja
5. Mendorong untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Tujuan**

Tujuan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

## **C. GAMBARAN UMUM SKPD**

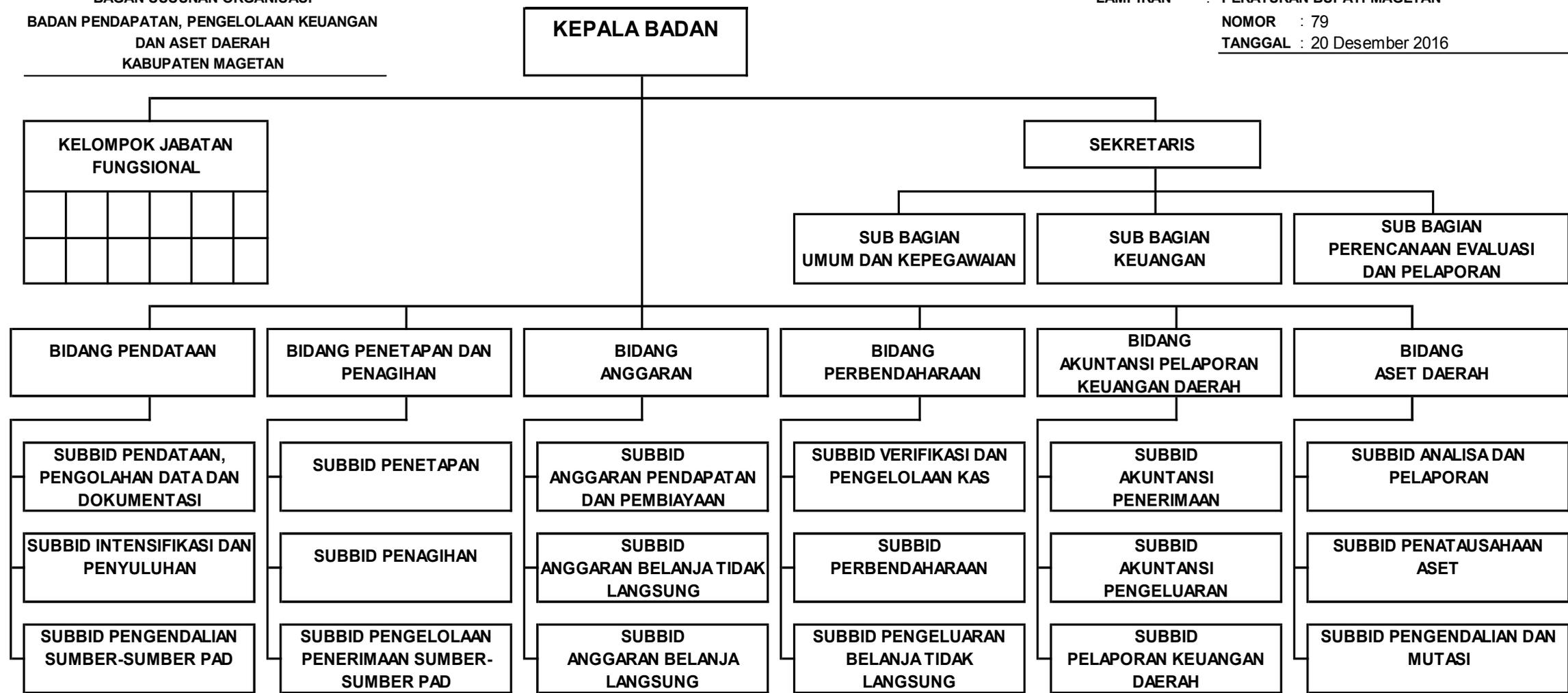
### **1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Magetan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Magetan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang membawahi ;
  - a. Subbagian umum dan kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pendataan, yang membawahi ;
  - a. Subbidang Pendataan, pengolahan data dan dokumentasi
  - b. Subbidang Intensifikasi dan Penyuluhan
  - c. Subbidang Pengendalian Sumber-sumber pendapatan asli daerah
4. Bidang Penetapan dan Penagihan, yang membawahi ;
  - a. Subbidang penetapan
  - b. Subbidang Penagihan
  - c. Subbidang Pengelolaan data pendapatan asli daerah lainnya
5. Bidang Anggaran, yang membawahi ;
  - a. Subbidang anggaran pendapatan dan pembiayaan
  - b. Subbidang anggaran belanja tidak langsung
  - c. Subbidang anggaran belanja langsung
6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi ;
  - a. Subbidang verifikasi dan pengelolaan kas
  - b. Subbidang perbendaharaan
  - c. Subbidang pengeluaran belanja tidak langsung
7. Bidang Akuntansi dan pelaporan, yang membawahi ;
  - a. Subbidang akuntansi penerimaan
  - b. Subbidang akuntansi pengeluaran
  - c. Subbidang pelaporan keuangan daerah
8. Bidang Aset, yang membawahi ;
  - a. Subbidang analisa dan pelaporan
  - b. Subbidang Penatausahaan aset
  - c. Subbidang Pengendalian dan Mutasi

Adapun Diagram Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dapat dilihat sbb :



## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPPKAD**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Adapun fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

### **Kepala BPPKAD**

Mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

### **Sekretaris BPPKAD**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

### **Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyiapkan bahan atau materi yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

### **Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas meneliti kebenaran Surat Perintah Membayar (SPM), menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), mengelola data gaji PNS, membuat laporan potongan dan penyetoran perhitungan dengan pihak ketiga, membuat usulan terkait penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pembinaan teknis ke kepala pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta melakukan pengawasan penatausahaan keuangan SKPD

### **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah**

Mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis, penelitian dan penilaian terhadap realisasi anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah.

### **Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, membina dan melakukan koordinasi di bidang pengelolaan aset.

### **Bidang Pendataan**

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, perencanaan dan pengendalian sumber-sumber Pendapatan Asli daerah

### **Bidang Penetapan dan Penagihan**

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penghitungan, penetapan, pendistribusian, verifikasi, penagihan dan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan sarana administrasi lainnya kepada wajib pajak.

### **3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (*human capital*) yang dimiliki. Dalam melaksanakan pemerintahan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, serta bertanggung jawab. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magetan sebanyak 81 orang terdiri dari 44 pegawai laki-laki dan 37 pegawai perempuan. Secara lebih rinci jumlah pegawai BPPKAD berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai  
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	10	9	19
2	Bidang Pendataan	7	5	12
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	11	4	15
4	Bidang Anggaran	4	3	7
5	Bidang Perbendaharaan	6	6	12
6	Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	3	6	9
7	Bidang Aset Daerah	4	4	8
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>37</b>	<b>82</b>

Keberagaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai  
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jml
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	1	0	3	0	0	0	14	1	19
2	Bidang Pendataan	0	0	5	0	0	0	7	0	12
3	Bidang Penetapan dan Penagihan	0	0	6	0	0	1	7	1	15
4	Bidang Anggaran	0	0	0	0	0	1	5	1	7
5	Bidang Perbendaharaan	0	0	3	0	0	0	9	0	12
6	Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	0	0	1	0	0	1	6	1	9
7	Bidang Aset Daerah	0	0	2	0	0	0	4	2	8
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>82</b>

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan dalam tabel diatas tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang paling banyak adalah Sarjana (S1) dan SMA yaitu sebanyak 73 orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan D1, D3 dan S2 sebanyak 8 orang dan SD sebanyak 1 orang.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

#### B. VISI

Visi merupakan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dalam hal ini tujuan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat RPJMD, bahwa visi pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah :

***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”***

Adapun indikator Masyarakat yang Smart yang sudah dikembangkan dan masih perlu dikembangkan lagi dikenal dengan SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

#### C. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi memberikan pedoman kepada semua aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Misinya yang terinci sebanyak 5 ( lima ), Misi yang mana salah satu di antaranya adalah “ Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, profesional dan adil”.

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan sumberdaya manusia (yang profesional) dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah yang mengandung pengertian mengembangkan sistem pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang dilandasi semangat profesionalisme untuk mewujudkan good governance.

#### **D. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

##### **Tujuan yang ingin dicapai oleh BPPKAD :**

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

#### **E. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah serta tugas lain diberikan oleh Bupati

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan PAPBD ;
- c. Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD
- d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD);
- e. Pelaksanaan pengendalian APBD;
- f. Perumusan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- g. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- h. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- i. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- j. Penyajian informasi PAD dan keuangan daerah ;
- k. Pelaksanaan penetapan pajak daerah ;
- l. Menyiapkan pelaksanaan pendataan, perencanaan, dan pengendalian sumber-sumber PAD;
- m. Pelaksanaan penghitungan, penetapan, pendistribusian, verifikasi, penagihan dan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;
- n. Pelaksanaan Optimalisasi Manajemen Aset Daerah ;
- o. Pelaksanaan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- q. Perumusan dan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ;
- r. Penatausahaan atas piutang daerah atau tagihan daerah ;
- s. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,

NO	KINERJA UTAMA		DIFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	
		Persentase aset daerah yang sudah bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah bidang aset tanah yang sudah bersertifikat}}{\text{Jumlah bidang aset tanah keseluruhan}} \times 100\%$	Laporan hasil persertifikatan tanah / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	
		Realisasi PAD	Jumlah PAD	Laporan Penerimaan PAD / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	

## F. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP
			Persentase aset daerah yang sudah bersertifikat
			Realisasi PAD

Perjanjian Kinerja

FORMULIR PENETAPAN KINERJA 2019  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Proram/kegiatan rutin	Indeks kepuasan masyarakat		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	523.800.000
		Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000
		Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	250.000.000
2		Prosentase Sarana dan prasarana yang layak pakai		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	79 kendaraan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000
		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	29 unit	Pengadaan Perlengkapan Kantor	797.000.000
		Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000
3		Presentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
		Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	12 orang	Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000
4		Persentase dokumen peremcamaam kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	

		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	3 Laporan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN ASET DAERAH	
		Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK Jumlah penyusunan Buku Induk Inventaris Jumlah SKPD penyusun status penggunaan BMD Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD yang disusun Jumlah pengembangan SPBMD	200 unit  141 buku  47 skpd  10 dokumen  1 modul	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	400.000.000
		Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	47 SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP-BMD)	35.000.000
		Jumlah tahapan penghapusan	1 tahap	Penghapusan Aset Daerah	50.000.000
		Jumlah dokumen semesteran aset	141 dokumen	Penyusunan Laporan Semesteran	50.000.000
		Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	20 Sertifikat	Persertifikatan Tanah	175.000.000
		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap	47 SKPD	Rekonsiliasi Aset Daerah	75.000.000
		Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	47 SKPD	Inventarisasi Aset daerah	400.000.000
		Jumlah pemasangan papan barang milik daerah	45 unit	Pengamanan Aset Daerah	150.000.000
		Jumlah BMD yang disewakan	200 unit	Pemanfaatan Aset Daerah	350.000.000

6		Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu		PROGRAM PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN MONITORING ANGGARAN DAERAH	
		Jumlah dokumen APBD yang disusun	6 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	305.000.000
		Jumlah dokumen Perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	315.000.000
		Jumlah SPD yang disusun	224 SPD	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000
		Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	75.000.000
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah	75.000.000
7		Persentase realisasi anggaran		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	
		Jumlah SP2D yang diterbitkan ; Jumlah pelaksanaan rekon	9000 SP2D ; 4 kali	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	205.000.000
		Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	20 kasus	Intensifikasi Penerimaan TP/TGR	30.000.000
		Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000
		Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan ; jumlah pelaksanaan rekon	250 SKPP ; 3 kali	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	200.000.000
		Jumlah laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	40 dokumen	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	250.000.000
8		Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu		PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	
		Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	1 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	285.000.000

		Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	2 dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	75.000.000
		Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	56 SKPD	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	170.000.000
		Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	80.000.000
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	4 kali	Rekonsiliasi benda berharga	25.000.000
9		Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Jumlah pengadaan alat pungut	99719 blok	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD	1.150.000.000
		Jumlah obyek atau wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	30000 WP	Pemutakhiran data dan pendampingan Pajak daerah	800.000.000
		Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 aplikasi	Pemeliharaan/operasional basis data PBB dan BPHTB serta aplikasi SIMPADA	25.000.000
		Jumlah dokumen data potensi pajak daerah	10 pajak daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	445.000.000
		Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	400 orang	Sosialisasi Perpajakan	150.000.000
		Realisasi Pajak daerah		PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	
10		Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	3000 SKP	Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah	1.350.000.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>9.910.800.000</b>

**Jumlah Anggaran Tahun 2019 Rp. 9.910.800.000**

**RINCIAN PROGRAM BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN ADALAH:**

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan dan pengembangan manajemen aset daerah
6. Program Perencanaan, penyusunan, dan monitoring anggaran daerah
7. Program Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah
8. Program Pengelolaan akuntansi dan laporan keuangan daerah
9. Program Pengelolaan pendapatan daerah
10. Program Peningkatan Pendapatan daerah

**BAB 3**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Magetan diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Magetan, merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). dengan skala ordinal sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%
	Persentase aset daerah yang sudah bersertifikat	100%	49%	49%
	Realisasi PAD	212.818.519.380,40	237.359.943.780,80	111,53

## B. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, telah dapat dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan dengan *performance* kinerja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP, dilaksanakan melalui 3 program, 16 Kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan, penyusunan dan monitoring anggaran daerah
  - a. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
  - b. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
  - c. Kegiatan Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
  - d. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
  - e. Monitoring pelaksanaan anggaran daerah

2. Program Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan daerah
  - a. Kegiatan Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
  - b. Kegiatan Intensifikasi penerimaan TP/TGR
  - c. Kegiatan Pemantapan pengelolaan keuangan daerah
  - d. Pengelolaan administrasi gaji dan rekon gaji PNS
  - e. Pengelolaan dana transfer ke daerah
3. Program Pengelolaan akuntansi dan laporan keuangan daerah
  - a. Kegiatan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
  - b. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - c. Kegiatan asistensi pengelolaan keuangan daerah
  - d. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah pusat
  - e. Kegiatan Rekonsiliasi benda berharga

Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP, karena tersusun dan tersampaikan dengan tepat waktu seluruh laporan keuangan yang menjadi kewajiban daerah untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2018.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
	Persentase aset daerah yang sudah bersertifikat	100%	49%	49%

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator : Persentase aset daerah yang sudah bersertifikat, dimana sampai tahun 2019, dari 1423 jumlah bidang tanah yang tercatat dalam Buku Inventaris, sebanyak 679 bidang tanah atau 49% yang sudah bersertifikat. Sementara untuk tahun 2019 sudah diterbitkan 29 buah sertifikat dan yang masih proses sebanyak 15 buah. Untuk perumusan indikator sendiri perlu adanya koreksi, dimana indikator yang tepat seharusnya "Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat pada tahun N ".

Indikator ini dilaksanakan melalui 1 Program, 1 kegiatan yaitu :

1. Program peningkatan dan pengembangan manajemen aset daerah
  - a. Peningkatan Manajemen Aset Daerah
  - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan pemeliharaan Brang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP-BMD)
  - c. Penghapusan Aset Daerah
  - d. Penyusunana Laporan Semesteran
  - e. Rekonsiliasi Aset Dearah
  - f. Inventarisasi Aset Daerah

- g. Pengamanan Aset Daerah
- h. Pemanfaatan Aset Daerah
- i. Kegiatan Persertifikatan tanah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
	Realisasi PAD	212.818.519.380,40	237.359.943.780,80	111,53

Pada tahun 2019 PAD targetnya adalah 212.818.519.380,40 dan tercapai 237.359.943.780,80 sehingga capaian kinerjanya adalah 111,53 %. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dilaksanakan melalui 2 Program, 5 kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD
- b. Pemutakhiran data dan pendampingan pajak daerah
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
- d. Sosialisasi perpajakan

2. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

- a. Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah

**C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2019, Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan sebesar Rp. 9.910.800.000,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 7.249.040.466,- atau 73,14%.

Adapaun rincian anggaran dan realisasinya kegiatan rutin Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	523.800.000	501.457.859	95,75
	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	0	0
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	250.000.000	246.392.976	98,56
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000	103.174.776	79,37
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	797.000.000	774.981.500	97,24
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000	98.032.650	98,03
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
	Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000	33.706.250	44,94
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	18.744.700	93,72
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN ASET DAERAH			
	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	400.000.000	265.705.929	66,43
	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP-BMD)	35.000.000	13.780.500	39,37
	Penghapusan Aset Daerah	50.000.000	31.537.400	63,07
	Penyusunan Laporan Semesteran	50.000.000	25.225.750	50,45
	Persertifikatan Tanah	175.000.000	171.400.180	97,94
	Rekonsiliasi Aset Daerah	75.000.000	68.523.000	91,36
	Inventarisasi Aset daerah	400.000.000	189.567.800	47,39
	Pengamanan Aset Daerah	150.000.000	144.600.000	96,40
	Pemanfaatan Aset Daerah	350.000.000	101.302.250	28,94
6	PROGRAM PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN MONITORING ANGGARAN DAERAH			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	305.000.000	241.480.643	79,17
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	315.000.000	231.813.236	73,59

	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000	65.910.190	65,91
	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	75.000.000	60.908.460	81,21
	Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah	75.000.000	45.811.200	61,08
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH			
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	205.000.000	171.899.131	83,85
	Intensifikasi Penerimaan TP/TGR	30.000.000	2.485.000	8,28
	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000	84.522.790	84,52
	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	200.000.000	167.345.550	83,67
	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	250.000.000	229.349.210	91,74
8	PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH			
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	90.998.000	91,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	285.000.000	278.106.517	97,58
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	75.000.000	69.785.018	93,05
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	170.000.000	164.359.845	96,68
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	80.000.000	55.879.720	69,85
	Rekonsiliasi benda berharga	25.000.000	24.560.000	98,24
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD	1.150.000.000	542.916.640	47,21
	Pemutakhiran data dan pendampingan Pajak daerah	800.000.000	28.221.050	3,53
	Pemeliharaan/operasional basis data PBB dan BPHTB serta aplikasi SIMPADA	25.000.000	23.258.000	93,03
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	445.000.000	421.453.056	94,71
	Sosialisasi Perpajakan	150.000.000	126.167.600	84,11
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH			
	Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah	1.350.000.000	1.333.676.090	98,79
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.910.800.000</b>	<b>7.249.040.466</b>	<b>73,14</b>

Sedangkan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Magetan adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Capaian Kinerja (%)
	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>50.255.000.000,00</b>	<b>56.927.247.908,93</b>	113,27
1	Pajak Hotel	400.000.000,00	840.398.895,00	210,01
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	3.395.866.215,00	169,79
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	90.058.000,00	180,11
4	Pajak Reklame	425.000.000,00	461.662.096,13	108,62
5	Pajak Penerangan Jalan	22.000.000.00000	22.183.740.640,00	100,83
6	Pajak Parkir	100.000.000,00	131.924.700,00	131,92
7	Pajak Air Bawah Tanah (Pajak Air Tanah)	80.000.000,00	91.223.720,20	114,02
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.500.000.000,00	23.726.333.509,00	110,35
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	2.700.000.000,00	5.021.818.258,00	185,99
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	984.221.875,00	98,42

#### PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Program/Kegiatan rutin	Indeks kepuasan masyarakat			
	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100
	Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	0	0
	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	100%	100
	Prosentase Sarana dan prasarana yang layak pakai			
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	79 kendaraan	78 kendaraan	98,73
	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	29 unit	29 unit	100
	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100
	Presentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi			
	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	12 orang	13 orang	108,33

	Persentase dokumen peremcamaam kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			
	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris			
	Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK	200 unit	180 unit	100
	Jumlah penyusunan Buku Induk Inventaris	141 buku	141 buku	100
	Jumlah SKPD penyusun status penggunaan BMD	47 skpd	47 skpd	100
	Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	100
	Jumlah pengembangan SPBMD	1 modul	1 modul	100
	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	47 SKPD		100
	Jumlah tahapan penghapusan	1 tahap	1 tahap	100
	Jumlah dokumen semesteran aset	141 dokumen	141 dokumen	100
	Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	20 Sertifikat	20 Sertifikat	100
	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi asaet tetap	47 SKPD	47 SKPD	100
	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	47 SKPD	47 SKPD	100
	Jumlah pemasangan papan barang milik daerah	45 papan	45 papan	100
	Jumlah BMD yang disewakan	200 unit	0	0
	Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu			
	Jumlah dokumen APBD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100,00
	Jumlah dokumen P- APBD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100
	Jumlah SPD yang disusun	224 SPD	485 SPD	216,52
	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	100
	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	100

	Persentase realisasi anggaran			
	Jumlah SP2D yang diterbitkan ; Jumlah pelaksanaan rekon	9000 SP2D ; 4 kali	11.991 SP2D ; 4 kali	100
	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	20 kasus	0	0
	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	285 orang	142,50
	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan ; jumlah pelaksanaan rekon	250 SKPP ; 3 kali	520 SKPP ; 3 kali	100
	Jumlah laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	40 dokumen	43 dokumen	104,50
	Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu			
	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	56 SKPD	56 SKPD	100
	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	150 orang	150
	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	4 kali	4 kali	100
	Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah			
	Jumlah pengadaan alat pungut	116.339 blok	124.475 blok	124,83
	Jumlah obyek atau wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	30000 WP	25000 WP	62,50
	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 aplikasi	1 aplikasi	50,00
	Jumlah dokumen data potensi pajak daerah	10 dokumen	10 dokumen	100
	Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	400 orang	400 orang	100
	Realisasi Pajak daerah			
	Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	3000 SKP	9.947 SKP	331,57

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA**

<b>Sasaran strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target Akhir RPJMD/Renstra</b>	<b>Reliasasi 2019</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Program/Kegiatan rutin	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>			
	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Jumlah dokumen survey IKM	5	0	0
	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	100%	100%
	<i>Prosentase Sarana dan prasarana yang layak pakai</i>			
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	395 kendaraan	78 kendaraan	19,75
	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	145 unit	29 unit	20
	Jumlah gedung yang dipelihara	5 gedung	1 gedung	20
	<i>Presentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi</i>			
	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	60 orang	13 orang	21,66
	<i>Persentase dokumen peremcamaam kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</i>			
	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	15 laporan	3 Laporan	20
<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris</i>			
	Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK	1200 unit	180 unit	15
	Jumlah penyusunan Buku Induk Inventaris	705 unit	141 buku	20
	Jumlah SKPD penyusun status penggunaan BMD	235 skpd	47 skpd	20
	Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD yang disusun	50 dokumen	10 dokumen	20

	Jumlah pengembangan SPBMD	5 modul	1 modul	20
	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	235 skpd	47 SKPD	20
	Jumlah tahapan penghapusan	15 tahap	1 tahap	6,66
	Jumlah dokumen semesteran aset	705 dokumen	141 dokumen	20
	Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	170 Sertifikat	20 Sertifikat	11,76
	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap	235 skpd	47 SKPD	20
	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	235 skpd	47 SKPD	20
	Jumlah pemasangan papan barang milik daerah	315 papan	45 papan	14,28
	Jumlah BMD yang disewakan	1000 unit	0	0
	<i>Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu</i>			
	Jumlah dokumen APBD yang disusun	30 dokumen	6 dokumen	20
	Jumlah dokumen P-APBD yang disusun	30 dokumen	6 dokumen	20
	Jumlah SPD yang disusun	1120 SPD	485 SPD	43,30
	Jumlah peserta sosialisasi	500 orang	100 orang	20
	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	20 rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	20
	<i>Persentase realisasi anggaran</i>			
	Jumlah SP2D yang diterbitkan ; Jumlah pelaksanaan rekon	42.500 SP2D ; 20 kali	11.991 SP2D ; 4 kali	28,21
	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	76 kasus	0	0
	Jumlah peserta sosialisasi	1400 orang	285 orang	20,35
	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan ; jumlah pelaksanaan rekon	1850 SKPP ; 15 kali	520 SKPP ; 3 kali	28,10
	Jumlah laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	230 dokumen	43 dokumen	18,69

	<i>Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu</i>			
	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	5 dokumen	1 dokumen	20
	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	20
	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	20
	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	280 skpd	56 SKPD	20
	Jumlah peserta sosialisasi	700 orang	150 orang	21,42
	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	20 kali	4 kali	20
	<i>Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah</i>			
	Jumlah pengadaan alat pungut	500.595 blok	124.475 blok	24,86
	Jumlah obyek atau wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	300.000 WP	25000 WP	8,33
	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 aplikasi	1 aplikasi	50
	Jumlah dokumen data potensi pajak daerah	100 dokumen	10 dokumen	20
	Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	2500 orang	400 orang	16
	<i>Realisasi Pajak daerah</i>			
	Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	15.000 SKP	9.947 SKP	66,31

#### PENCAIRAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Program / Kegiatan rutin	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>						
	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100	523.800.000	501.457.859	95,75

	Jumlah dokumen survey IKM	1 dokumen	0	0	20.000.000	0	0
	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	100%	100	250.000.000	246.392.976	98,56
	<i>Prosentase Sarana dan prasarana yang layak pakai</i>						
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	79 kendaraan	78 kendaraan	98,73	130.000.000	103.174.776	79,37
	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	29 unit	29 unit	100	797.000.000	774.981.500	97,24
	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100	100.000.000	98.032.650	98,03
	<i>Presentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi</i>						
	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	12 orang	13 orang	108,33	75.000.000	33.706.250	44,94
	<i>Persentase dokumen peremcamaam kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</i>						
	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100	20.000.000	18.744.700	93,72
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	<i>Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris</i>						
	Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK	200 unit	180 unit	90	400.000.000	265.705.929	66,43

	Jumlah penyusunan Buku Induk Inventaris	141 buku	141 buku				
	Jumlah SKPD penyusun status penggunaan BMD	47 skpd	47 skpd				
	Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD yang disusun	10 dokumen	10 dokumen				
	Jumlah pengembangan SPBMD	1 modul	1 modul				
	Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	47 SKPD	47 SKPD	100	35.000.000	13.780.500	39,37
	Jumlah tahapan penghapusan	1 tahap	1 tahap	100	50.000.000	31.537.400	63,07
	Jumlah dokumen semesteran aset	141 dokumen	141 dokumen	100	50.000.000	25.225.750	50,45
	Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	20 Sertifikat	20 Sertifikat	100	175.000.000	171.400.180	97,94
	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi aset tetap	47 SKPD	47 SKPD	100	75.000.000	68.523.000	91,36
	Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	47 SKPD	47 SKPD	100	400.000.000	189.567.800	47,39
	Jumlah pemasangan papan barang milik daerah	45 papan	45 papan	100	150.000.000	144.600.000	96,40
	Jumlah BMD yang disewakan	200 unit	0		350.000.000	101.302.250	28,94
	<i>Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu</i>						
	Jumlah dokumen APBD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen		305.000.000	241.480.643	79,17
	Jumlah dokumen P-APBD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100	315.000.000	231.813.236	73,59
	Jumlah SPD yang disusun	224 SPD	485 SPD	100	100.000.000	65.910.190	65,91
	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	216,52	75.000.000	60.908.460	81,21

	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	4 rekonsiliasi	100	75.000.000	45.811.200	61,08
	<i>Persentase realisasi anggaran</i>						
	Jumlah SP2D yang diterbitkan ; Jumlah pelaksanaan rekon	8500 SP2D ; 4 kali	11.991 SP2D ; 4 kali	100	205.000.000	171.899.131	83,85
	Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	20 kasus	0	0	30.000.000	2.485.000	8,28
	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	285 orang	142,50	100.000.000	84.522.790	84,52
	Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan ; jumlah pelaksanaan rekon	250 SKPP ; 3 kali	520 SKPP ; 3 kali	100	200.000.000	167.345.550	83,67
	Jumlah laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	40 dokumen	43 dokumen	104,50	250.000.000	229.349.210	91,74
	<i>Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu</i>						
	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100	100.000.000	90.998.000	91,00
	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	285.000.000	278.106.517	97,58
	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	75.000.000	69.785.018	93,05
	Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	56 SKPD	56 SKPD	100	170.000.000	164.359.845	96,68
	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	150 orang	150	80.000.000	55.879.720	69,85

	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	4 kali	4 kali	100	25.000.000	24.560.000	98,24
	<i>Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah</i>						
	Jumlah pengadaan alat pungut	116.339 blok	124.475 blok	124,83	1.150.000.000	542.916.640	47,21
	Jumlah obyek atau wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	30000 WP	25000 WP	62,50	800.000.000	28.221.050	3,53
	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 aplikasi	1 aplikasi	50,00	25.000.000	23.258.000	93,03
	Jumlah dokumen data potensi pajak daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	445.000.000	421.453.056	94,71
	Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	400 orang	400 orang	100	150.000.000	126.167.600	84,11
	<i>Realisasi Pajak daerah</i>						
	Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	3000 SKP	9.947 SKP	331,57	1.350.000.000	1.333.676.090	98,79

#### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian kinerja (%)	Penyerapan anggaran (%)	Tingkat efesiensi (%)
	Program/Kegiatan rutin	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>			
		Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	95,75	4,25
		Jumlah dokumen survey IKM	0	0	100
		Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100	98,56	1,44
		<i>Prosentase Sarana dan prasarana yang layak pakai</i>			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	98,73	79,37	19,36
		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	100	97,24	2,76

		Jumlah gedung yang dipelihara	100	98,03	1,97
		<i>Persentase pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi</i>			
		Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	108,33	44,94	55,06
		<i>Persentase dokumen peremcamaam kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</i>			
		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100	93,72	6,28
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	<i>Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris</i>			
		Jumlah kendaraan pembaharuan dan perpanjangan STNK	100	66,43	33,57
		Jumlah penyusunan Buku Induk Inventaris			
		Jumlah SKPD penyusun status penggunaan BMD			
		Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD yang disusun			
		Jumlah pengembangan SPBMD			
		Jumlah SKPD yang menyusun rencana kebutuhan BMD	100	39,37	60,63
		Jumlah tahapan penghapusan	100	63,07	36,93
		Jumlah dokumen semesteran aset	100	50,45	49,55
		Jumlah sertifikat aset tetap tanah Pemkab Magetan	100	97,94	2,06
		Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi asaet tetap	100	91,36	8,64
		Jumlah SKPD yang dilakukan inventarisasi aset	100	47,39	52,61
		Jumlah pemasangan papan barang milik daerah	100	96,40	3,6
		Jumlah BMD yang disewakan	0	28,94	
		<i>Persentase dokumen penganggaran yang tepat waktu</i>			

		Jumlah dokumen APBD yang disusun	100	79,17	20,83
		Jumlah dokumen P-APBD yang disusun	100	73,59	26,1
		Jumlah SPD yang disusun	216,52	65,91	34,09
		Jumlah peserta sosialisasi	100	81,21	18,79
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi	100	61,08	38,92
		<i>Persentase realisasi anggaran</i>			
		Jumlah SP2D yang diterbitkan ; Jumlah pelaksanaan rekon	100	83,85	16,15
		Jumlah penanganan kasus kerugian daerah	0	8,28	0
		Jumlah peserta sosialisasi	142,50	84,52	15,48
		Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan ; jumlah pelaksanaan rekon	100	83,67	16,33
		Jumlah laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	104,50	91,74	8,26
		<i>Persentase dokumen LKPD yang disusun tepat waktu</i>			
		Jumlah dokumen kebijakan akuntansi pemerintah	100	91,00	9,00
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100	97,58	2,42
		Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran yang disusun	100	93,05	6,95
		Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dari BPKP dan BPPKAD	100	96,68	3,32
		Jumlah peserta sosialisasi	150	69,85	30,15
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga	100	98,24	1,76
		<i>Persentase realisasi pajak dan retribusi daerah</i>			
		Jumlah pengadaan alat pungut	124,83	47,21	52,79
		Jumlah obyek atau wajib pajak yang dilakukan pemutakhiran	62,50	3,53	58,99
		Jumlah aplikasi yang dipelihara	50	93,03	43,03

		Jumlah dokumen data potensi pajak daerah	100	94,71	5,29
		Jumlah peserta sosialisasi perpajakan	100	84,11	15,89
		<i>Realisasi Pajak daerah</i>			
		Jumlah dokumen SKP yang ditetapkan	331,57	98,79	1,21

### **C Realisasi Anggaran**

- Pada APBD tahun anggaran 2019 BPPKAD melaksanakan 10 program dan 39 kegiatan
- Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.910.800.000,-
- Dari anggaran Rp. 9.910.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.249.040.466 atau 73,14

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk perwujudan pertanggung jawaban kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang dipergunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 sangat penting untuk mengukur kemampuan kinerja. Menyingkapi faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja, tantangan yang perlu dipertimbangkan serta untuk menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran :

1. Capaian Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 :
  - Pagu anggaran BPPKAD sebesar Rp. 9.910.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.249.040.466,- atau sebesar 73,14
  - Hampir semua program kegiatan bisa dilaksanakan dan pencapaian kinerjanya mencapai 100%
  - Terdapat efisiensi sumberdaya anggaran pada semua kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 % bahkan ada yang lebih dari 100% sedangkan penyerapan anggarannya secara total sebesar Rp. 73,14 %, Penghematan sebesar 26,86% dari total Anggaran.
2. Catatan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 meliputi :
  - Sumber Daya Manusia yang kurang /belum memahami terhadap Tupoksi
  - Sarana dan prasarana yang masih kurang (belum memadai)
3. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 meliputi :
  - a. Adanya perubahan dan penerbitan beberapa regulasi dalam pola pengelolaan keuangan.
  - b. Menerapkan sistem Pengelolaan keuangan daerah berbasis aktual, dengan bintek dan pelatihan untuk SDM SKPD terkait.

## B. SARAN DAN LANGKAH –LANGKAH MENDATANG

1. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja aparatur BPPKAD tahun 2019 dan merencanakan kegiatan tahun 2020 dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin terjadi.
2. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia secara berkesinambungan pada diklat/Bintek teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan manajemen aset daerah.
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD pada sistem Pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan pajak daerah.

